

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur:

- Abdul Kadir, Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Sunggono, bambang, *Metode Penelitian Hukum, Cet 5*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2023
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008.
- Djojodirdjo, M.A. Moegni, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta 1982.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, CV.Rajawali, 1996.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Sumur, Bandung, 1966.
- Soekanto, Soerjonodan dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta 2008.
- Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, AlfaBeta, Bandung, 2012.
- Sundari, *Pengajuan Gugatan Secara Class Action (Suatu Studi Perbandingan dan penerapannya di Indonesia)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2002.
- Sunggono, bambang, *Metode Penelitian Hukum, Cet 5*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2023.
- Soedharyo, Soimim, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1990.

Jurnal Ilmiah

- Angela Christina Natalia Kaunang, et. al., “Citizen Lawsuit Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia,” *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 10 No. 3, 2022.
- Derry Angling Kesuma, “Penguatan Gugatan Citizen Lawsuit/Action Popularis sebagai Upaya Perlindungan Hak Konstitusional atas Jaminan Penegakan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara terhadap Perbuatan Melawan Hukum oleh Negara,” *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3 No. 1, 2023.
- Mendy Cevitra dan Gunawan Djajaputra, “Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya,” *Unes Law Review*, Vol. 6 No.1, 2023.
- Muhammad Adiguna Bimasakti, “Onrechtmatig Overheidsdaad Oleh Pemerintah Dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan”, *Jurnal*

Hukum Peratun, Vol. 1, No. 2, 2018.

Rahadi Wasi Bintoro, "Tuntutan Hak dalam Persidangan Perkara Perdata," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 2, 2010.

Riko Wibawa Sitanggang, "Kewenangan Mengadili Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) Yang Bersifat Keperdataan," *Honeste Vivere*, Vol. 35 No. 2, 2025

Rizky Ramadhani Kurniawan, "Integrasi Citizen Lawsuit sebagai Hak Prosedural atas Lingkungan Hidup dalam Dimensi HAM," *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 1 No. 1, 2017

Syukron Salam, "Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa," *Nurani Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2018.

Wicaksono, Diskursus Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Perbuatan Pemerintah Dalam Pengadaan Barang/Jasa, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 9, No. 3, 2020.

Wiwin Dwi Ratna Febriyanti, "Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Pembentukan Hukum (Rechtsschepping) dalam Sistem Peradilan Indonesia," *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, Vol. 13 No. 2, 2025.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*)

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1206 K/Pdt/2024

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 274/PDT/2023/PT DKI

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusata Nomor 689/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst